



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, BPLS, DAN BPWS)**

Tahun Sidang : 2011 – 2012
Masa Sidang : IV
Rapat : Ke – 12 (dua belas)
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal : Rabu, 20 Juni 2012
Sifat : Terbuka
Pukul : 14.30 WIB s.d 22.15 WIB
Tempat : Ballroom A, Hotel Arya Duta Tugu Tani – Jakarta Pusat
Acara : Pembahasan Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, dan Kegiatan Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA. 2013.
Ketua Rapat : Ir. H. Mulyadi
Sekretaris : Dra. Prima M.B. Nuwa, M.Si.
Hadir Anggota : dari 53 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra : Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan Pembinaan Konstruksi (BP Konstruksi) dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pekerjaan Umum beserta jajaran.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Ketua Rapat membuka rapat pukul 14.30 WIB setelah kuorum terpenuhi, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Dalam pengantarnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan Pembinaan Konstruksi (BP Konstruksi) dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pekerjaan Umum pada hari ini adalah dalam rangka Pembahasan Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, dan Kegiatan Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA. 2013.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan Pembinaan Konstruksi (BP Konstruksi) dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pekerjaan Umum untuk menyampaikan penjelasan dan paparannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan tanggapan dan pertanyaan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi V DPR RI akan mendalami lebih lanjut program kegiatan yang disampaikan pada RKP 2013, dengan alokasi anggaran pada Kementerian Pekerjaan Umum sebagai berikut :
 - a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp. 615 Miliar,
 - b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp. 126 Miliar,
 - c. Badan Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp. 459 Miliar, dan
 - d. Badan Pembinaan Konstruksi sebesar Rp. 334 Miliar.
2. Komisi V DPR RI dan Kementerian Pekerjaan Umum sepakat untuk memperjuangkan kenaikan pagu anggaran yang dibutuhkan sesuai dengan hasil Rapat Konsultasi Regional Kementerian Pekerjaan Umum dan Musrenbangnas dalam rapat pembahasan di Badan Anggaran DPR RI dan diputuskan dalam pembahasan Komisi V DPR RI dengan Kementerian Pekerjaan Umum.
3. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum agar menerapkan penyusunan anggaran berbasis kinerja dengan melakukan seleksi usulan secara ketat, sehingga tidak ada lagi program/kegiatan yang diragukan *outcome*-nya dapat lolos dalam usulan pada Tahun Anggaran 2013.
4. Komisi V DPR RI meminta Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum agar melakukan pembinaan kepada penyedia jasa konstruksi yang bertindak tidak profesional, agar pembangunan yang sudah direncanakan tidak terhambat.
5. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum agar strategi pemaketan pekerjaan jasa konsultasi disesuaikan dengan ketersediaan tenaga ahli berdasarkan hasil studi dan masukan dari Badan Pembinaan Konstruksi.
6. Komisi V DPR RI meminta Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum untuk memberikan penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) pada penyedia jasa konstruksi.
7. Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian Pekerjaan Umum bahwa program paling prioritas di Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum adalah program PPIP sehingga pada tahun 2013 harus terlaksana minimal 5000 desa, dan program P2KP.
8. Komisi V DPR RI meminta Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum agar dalam penugasan Inspektur mengacu kepada Permen PU No. 08 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum khususnya penugasan berdasarkan wilayah yang sudah ditetapkan.
9. Komisi V DPR RI meminta Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum untuk mempertajam Standar Operasional Prosedur (SOP), indikator dan parameter yang terukur terhadap pengaduan yang dapat ditindaklanjuti.
10. Komisi V DPR RI meminta Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum agar memeriksa paket pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan pada Tahun Anggaran 2011 antara lain Jalan Merlung-Jambi, dimana dalam hal ini Satuan Kerja (Satker) telah mengeluarkan surat *blacklist* kepada Penyedia Jasa.

11. Komisi V DPR RI meminta/hal. 3

11. Komisi V DPR RI meminta Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan kajian/penelitian terkait aspek keselamatan dan keamanan bangunan pada program rumah murah yang ada di berbagai instansi.
12. Komisi V DPR RI meminta Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum untuk membuat *prototype* rumah yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah, antara lain rumah tahan gempa di Provinsi Sumatera Barat.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 22.15 WIB.

Jakarta, 20 Juni 2012

KETUA RAPAT,

TTD

IR. H MULYADI

SEKRETARIS JENDERAL,

TTD

IR. AGOES WIDJANARKO, MIP.

INSPEKTUR JENDERAL,

TTD

DR. IR. M. BASOEKI HADIMOELJONO, MSC.

KEPALA BP KONSTRUKSI,

TTD

IR. R. BAMBANG GOERITNO SOEKAMTO, MSC, MPA

KEPALA BALITBANG,

TTD

IR. GRAITA SUTADI, MSC.